

KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM PENJAMINAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Novia Nurhayati¹, Zainal Berlian², Arwan³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

nurhayatinovia052@gmail.com , zainal_berlian@radenfatah.ac.id ,
arwan_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

This research aims to examine the role of stakeholder collaboration in ensuring the quality of Islamic educational institutions. This research uses a qualitative approach with a library research type, with data sources including books, scientific journals, and regulations relevant to the research topic. Data collection techniques were carried out thru documentation studies, while data analysis used qualitative descriptive techniques thru the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results show that stakeholder collaboration involving school principals, teachers, students, parents, the government, and the community plays a strategic role in improving the quality of education. That collaboration is able to strengthen the planning, implementation, and evaluation of education oriented toward quality standards. However, there are various challenges in its implementation, such as differing viewpoints, limited time and resources, lack of effective communication, and resistance to change. Therefore, strong synergy, effective leadership, and open communication are needed to optimize stakeholder collaboration. Thus, stakeholder collaboration becomes a key factor in realizing sustainable quality assurance in Islamic education.

Keywords: stakeholder collaboration, quality assurance, Islamic education, educational management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kolaborasi stakeholder dalam penjaminan mutu lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research), dengan sumber data berupa buku, jurnal ilmiah, serta regulasi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi stakeholder yang melibatkan kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, pemerintah, dan masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kolaborasi tersebut mampu memperkuat perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pendidikan yang berorientasi pada standar mutu. Namun demikian, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, seperti perbedaan pandangan, keterbatasan waktu dan sumber daya, kurangnya komunikasi efektif, serta resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat, kepemimpinan yang efektif, serta komunikasi yang terbuka untuk mengoptimalkan kolaborasi stakeholder. Dengan

demikian, kolaborasi stakeholder menjadi faktor kunci dalam mewujudkan penjaminan mutu pendidikan Islam yang berkelanjutan.

Kata Kunci: kolaborasi stakeholder, penjaminan mutu, pendidikan Islam, manajemen pendidikan

A. Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman peradaban, proses menuntut ilmu pengetahuan telah melembaga dalam bentuk lembaga pendidikan dari tingkat terendah sampai tertinggi dengan kaya akan visi dan misinya masing-masing. Seiring dengan berkembangnya lembaga pendidikan, Negara hadir untuk membuat regulasi yang mendorong terwujudnya lembaga pendidikan yang berkualitas. Salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kehadiran Standar Nasional Pendidikan merupakan kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu. (Syibromilisi et al., 2023)

Usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini telah lama diupayakan. Sejak Indonesia merdeka

sampai di era informasi sekarang ini, peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Berbagai inovasi dan program pendidikan juga telah ditempuh. Penyempurnaan kurikulum, pengadaan bahan ajar, buku paket, pengadaan sarana, dan termasuk peningkatan mutu guru. Upaya tersebut dilakukan karena pendidikan bermutu merupakan harapan bagi bangsa ini. Pendidikan diharapkan dapat melahirkan manusia Indonesia seutuhnya, sebagaimana terdapat dalam perundangan yang berlaku. Pendidikan yang bermutu harus disediakan melalui jalur, jenis, dan jenjang yang ada dalam sistem pendidikan kita, termasuk pendidikan madrasah. Pendidikan yang bermutu dapat terselenggara dengan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Pendidikan bermutu pada setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan harus dapat diakses oleh

seluruh warga Indonesia.(Anwar, 2018)

Di balik pendidikan yang baik ada stakeholder yang baik juga maka, partisipasi stakeholder membantu memperkuat keterhubungan antara pesantren dan masyarakat sekitar. Melibatkan masyarakat dalam pengembangan kurikulum membangun hubungan positif dan relevansi yang erat dengan kebutuhan lokal. Hal ini juga membantu mengintegrasikan nilai-nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal ke dalam kurikulum, yang pada gilirannya memperkaya pengalaman belajar siswa. Dalam prosesnya, partisipasi ini juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan dalam dunia pendidikan, serta menghargai kontribusi setiap pihak yang terlibat. Dengan melihat keseluruhan gambaran tersebut, partisipasi stakeholder dalam pengembangan kurikulum bukanlah sekadar langkah formal, tetapi merupakan pondasi yang mendasari pendidikan yang holistik dan berdampak. Dalam lingkungan pendidikan yang terus berkembang, keterlibatan pengurus pesantren, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar adalah modal penting dalam merancang kurikulum

yang mengakomodasi kebutuhan peserta didik, memberikan pengetahuan yang relevan, dan membentuk karakter yang kuat.(Sholeh et al., 2023)

Dalam pendidikan, stakeholder konteks utama meliputi kepala sekolah, guru, siswa, orang tua/wali murid, pemerintah, dan masyarakat. Masing-masing memiliki kepentingan dan harapan yang perlu dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Kolaborasi yang efektif antara stakeholder dapat memastikan bahwa kurikulum dirancang dan diterapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif dari sehingga berbagai pihak, menciptakan proses pembelajaran yang lebih bermakna dan berdampak positif bagi siswa.(Saima Sonang Pohan, Neliwati, 2024)

Maka dari itu pentingnya Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu Pendidikan yaitu untuk menghasilkan manajemen yang berkualitas dalam mencapai tujuannya di sekolah, dalam penerapan manajemen mutu pendidikan harus ada upaya-upaya untuk kesepakatan bersama meningkatkan kualitas melalui

perbaikan proses manajemen yang didukung oleh kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat ini akan sangat menentukan kelangsungan hidup organisasi yang berisi seperangkat prosedur yang dapat digunakan oleh setiap orang dalam memperbaiki kinerja secara terus menerus. Perbaikan dan peningkatan mutu merupakan sasaran utama dari manajemen untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas sekolah.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian teoritis mengenai kolaborasi stakeholder dalam penjaminan mutu lembaga pendidikan Islam yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi,

yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terkait pentingnya kolaborasi stakeholder dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Kolaborasi Stakeholder Dalam Penjaminan Mutu Lembaga Pendidikan Islam

Penjaminan mutu (Quality Assurance) merupakan istilah yang digunakan untuk mewakili kegiatan monitoring, evaluasi, atau kajian (review) mutu. Kegiatan penjaminan mutu tertuju pada proses untuk membangun kepercayaan, dengan cara melakukan pemenuhan persyaratan atau standar minimum pada komponen input, komponen proses, dan hasil atau outcome, sesuai dengan yang diharapkan oleh stake holders. Dalam bidang

pendidikan, penjaminan mutu merupakan cara mengatur semua kegiatan dan sumber daya pendidikan yang diarahkan pada kepuasan pelanggan.(Anwar, 2018)

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 28 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu (dalam Tim BPK, 2020). Definisi serupa juga ditemukan pada Permen Ristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Namun demikian, mutu atau kualitas (quality) sendiri memiliki medan makna yang cukup luas dan harus dikerucutkan untuk membuat suatu ruang lingkup yang jelas. Seperti yang diungkapkan oleh Sallis (dalam Purwanto, 2020, hlm. 172). Bersinggungan dengan kekaburan ini, Brown menjelaskan bahwa mutu dapat dipastikan dengan melakukan beberapa pendekatan:(Syahputra et al., 2023) 1) Quality Control (

Pengontrolan Mutu), Tahap awal yang akan menentukan apa yang ingin dicapai seseorang sehubungan dengan tujuan dan sasaran. Standar juga diperlukan sebagai bagian dari spesifikasi ini untuk mengukur tingkat pencapaian. 2) Quality Assurance (Penjaminan Mutu), Penjaminan mutu melibatkan penetapan bahwa terdapat sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa tujuan terpenuhi secara konsisten dan andal serta ditinjau secara berkala. 3) Quality Improvement and Transformation (Peningkatan dan Transformasi Mutu), Peningkatan mutu dapat dipahami sebagai tahap berikutnya dan konsekuensi dari masing-masing dimensi. Misalnya, peningkatan mutu harus mengikuti kontrol mutu dengan memperbaiki kesalahan atau menyumbat kesenjangan dalam pencapaian tujuan. Pada tingkat di luar ini, peningkatan mutu menjadi transformasi mutu.

Dengan demikian, mutu merupakan suatu kualitas secara keseluruhan akan suatu hal yang menyelubungi suatu penyelenggaraan atau produksi suatu hal yang dalam konteks ini adalah penyelenggaraan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa penjaminan mutu

pendidikan adalah suatu kegiatan sistemik, terpadu, dan berkelanjutan oleh satuan atau program pendidikan, pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak terkait dan berwenang lainnya untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

Konsep Pendidikan Islam dan Karakteristiknya

Memahami pendidikan dan Islam, dapat kita mulai dengan menelusuri pengertian pendidikan dan Islam itu sendiri. Karena dalam pengertian pendidikan dan Islam itu sendiri terkandung indikator-indikator esensial. Pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam konteks Islam inheren dengan konotasi istilah tarbiyah, ta'lim dan ta'dib yang harus dipahami secara bersama. Di dalam tiga istilah tersebut terkandung ilmu pengetahuan terkait bagaimana pendidikan sebagai proses pengembangan manusia sesuai ajaran Islam dalam masyarakat, lingkungan serta dalam hubungannya dengan Tuhan yang saling berkaitan satu sama lain. Dari tiga istilah tersebut ruang lingkup pendidikan Islam hadir bersifat:

informal, formal dan non formal. (Turmuzi, 2021)

Menurut Syekh Muhammad An-Naquib Al-Attas, Pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan keberadaan.

Musthafa Al-Ghulayaini memberikan pengertian Pendidikan Islam yaitu menanamkan akhlak mulai di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan (meresap dalam) jiwanya, kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan dan cinta bekerja untuk memanaatkantanahair. (Surawardi, 2017)

Pembahasan tentang dasar pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari Islam dengan segala ajarannya, ajaran itu bersumber pada Al-Qur'an Sunnah Rasulullah SAW dan rakyu (hasil fikir manusia). Tiga sumber itu harus digunakan secara

hirarkis. Al-Qur'an harus didahului apabila suatu ajaran atau penjelasannya tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, maka harus dicari di dalam sunnah, apabila tidak juga ditemukan di dalam sunnah, barulah digunakan rakyu, sunnah tidak dapat bertentangan dengan Al- Qur'an dan Rakyu tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Menurut Hery Noer Aly, MA dalam buku beliau "Ilmu Pendidikan Islam, Dasar Pendidikan Islam secara garis besar ada 3 yaitu: Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ra'yu.(Surawardi, 2017) Pendidikan Islam sebagai ilmu, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, karena di dalamnya banyak segi-segi atau pihak-pihak yang ikut terlibat baik langsung atau tidak langsung.

Adapun segi-segi dan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan Islam sekaligus menjadi ruang lingkup pendidikan Islam adalah sebagai berikut: (Surawardi, 2017) 1) Perbuatan mendidik itu sendiri, 2) Anak didik, 3) Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam, 4) Pendidik, 5) Materi Pendidikan Islam, 6) Metode Pendidikan Islam 7) Evaluasi Pendidikan, 8) Alat-Alat Pendidikan

Islam dan 9) Lingkungan Sekitar atau Millieu Pendidikan Islam.

Teori Kolaborasi dan Peran Stakeholder dalam Pendidikan

Kolaborasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kerjasama. Kolaborasi merupakan praktek bekerja sama dimana individu atau lembaga yang bekerja sama memiliki tujuan yang sama, untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Menurut B. Diamant-Cohen dan D. Sherman (2003) dalam Buchanan, S., Gibb, F., Simmons, S., & McMenemy, D. (2012) mendefinisikan kolaborasi sebagai kerjasama lebih terlibat, di mana ada pembagian yang lebih mendalam serta penyatuan sumber daya. Kolaborasi lebih kompleks dari kerjasama. Kolaborasi diawali dengan kontak atau komunikasi kedua belah pihak yang akan berkolaborasi, ada dialog eksplorasi atas sumberdaya yang dimiliki serta kemungkinan kolaborasi yang dapat dilakukan. Dialog ditindaklanjuti dengan merencanakan kegiatan kolaborasi, melaksanakan dengan terus melakukan koordinasi yang berupaya untuk menciptakan sesuatu yang baru.(Istiana, n.d.)

Kolaborasi merupakan kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Adanya tujuan yang akurat dan penciptaan work plan menjadi dimensi hasil sementara pada proses kolaborasi. Kolaborasi juga dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama antar stakeholders yang digabungkan menjadi satu dalam suatu tujuan ataupun pan dangan yang sama secara real.(Verliya Veriyani*, 2023)

Maka dengan adanya kolaborasi ini di dalam dunia pendidikan diharapkan stakeholder baik kepala sekolah,guru,staf dan warga sekolah bisa saling melengkapi kekurangan yang ada dan selalu rukun agar bisa mencapai tujuan bersama.

Peran stakeholder dalam pendidikan

Stakeholder dalam hal ini adalah kepala sekolah memiliki peran yang sangat urgen sekali dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif. Tentunya pembelajaran tersebut tidak terlepas dengan 3 hal yang penulis jelaskan di atas, yaitu terkait dengan pembelajaran Akhlaq, Nilai Lokal, dan Humanis. Maka dari itu, untuk mewujudkan terselenggaranya 3 pembelajaran yang efektif tersebut seorang kepala

sekolah memiliki peran, diantaranya sebagai berikut :(Habib et al., 2025) 1) Menjadi Leadershep yang Baik. 2) Merencanakan Strategi yang Inovatif. 3) Melaksanakan Progam dengan Maksimal.

Peran kepala sekolah dalam melaksanakan progam secara maksimal apabila dikaji menggunakan pendekatan Fenomenologi maka dapat diketahui bahwasannya, saat ini apabila melihat visi misi dari suatu instansi pendidikan itu sangat banyak sekali, akan tetapi tidak 100 % terlaksana semuanya. Maka dari itu fenomena yang demikian sebenarnya adalah sebuah kewajiban, akan tetapi ada hikmah yang bisa diambil. Hikmahnya yaitu, apabila membuat suatu perencanaan tidak harus banyak-banyak, cukup beberapa saja, tetapi semua perencanaan yang dibuat itu dilaksanakan semuanya dengan baik.

Jadi Stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Dengan Perkataan lain Stakeholder adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan

pendidikan di sekolah. Dalam manajemen sebuah pendidikan atau lembaga pendidikan Stakeholder adalah sebuah indikator untuk menentukan mutu dan atau layanan lembaga pendidikan.

Tantangan Kolaborasi Stakeholder Dalam Penjaminan Mutu Lembaga Pendidikan Islam

Meskipun upaya kolaborasi telah dilakukan, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Kesulitan dalam menyesuaikan jadwal pertemuan merupakan tantangan yang umum dihadapi dalam kolaborasi stakeholder, mengingat kesibukan dan jadwal yang berbeda beda. Oleh karena itu, diperlukan fleksibilitas dan teknologi pertemuan untuk virtual. pemanfaatan memfasilitasi Perbedaan perspektif dan prioritas di antara stakeholder juga merupakan tantangan yang harus diatasi. Setiap stakeholder memiliki sudut pandang dan kepentingan yang berbeda, sehingga dapat perbedaan menimbulkan pendapat dalam pengambilan keputusan. Melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghargai, perbedaan tersebut dapat dijembatani untuk mencapai solusi yang

mengakomodasi kepentingan semua pihak.(Saima Sonang Pohan, Neliwati, 2024)

1) Perbedaan Pandangan dan Prioritas: Stakeholder yang beragam mungkin memiliki pandangan dan prioritas yang berbeda mengenai kurikulum. Pandangan ini dapat berasal dari perbedaan pemahaman agama, budaya, dan sosial. Tantangan ini melibatkan kesulitan dalam merumuskan tujuan bersama dan memadukan berbagai perspektif. 2) Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya: Banyak stakeholder memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan kurikulum. Guru dan ulama, misalnya, mungkin memiliki keterikatan dengan tugas-tugas lain yang menghambat keterlibatan penuh mereka dalam proses ini. 3) Ketidaksetaraan Representasi: Tidak semua stakeholder memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi. Misalnya, santri yang lebih muda atau kurang berpengalaman mungkin merasa enggan untuk menyuarakan pendapat mereka di hadapan tokoh-tokoh agama atau ulama. 4) Tantangan Teknis: Pengembangan kurikulum memerlukan pemahaman teknis dan

metodologi yang mungkin tidak dimiliki oleh semua stakeholder. Ini bisa menjadi hambatan bagi partisipasi yang efektif, terutama ketika melibatkan orangtua atau anggota masyarakat yang mungkin tidak memiliki latar belakang pendidikan formal. 5) Politik dan Kepentingan Pribadi: Tantangan ini muncul ketika ada konflik kepentingan atau politik di antara stakeholder yang dapat memengaruhi keputusan pengembangan kurikulum. Kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dapat mempengaruhi kesepakatan yang objektif. 6) Kurangnya Komunikasi Efektif: Kurangnya komunikasi yang baik antara stakeholder dapat menghambat pertukaran ide dan pemahaman yang diperlukan untuk pengembangan kurikulum yang berkualitas. 7) Resistensi terhadap Perubahan: Beberapa stakeholder mungkin resisten terhadap perubahan dalam kurikulum yang telah ada selama bertahun-tahun. Mereka mungkin merasa bahwa perubahan tersebut mengancam tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh. 8) Ketidakpastian Hasil: Dalam beberapa kasus, partisipasi stakeholder mungkin tidak menghasilkan

konsensus yang jelas atau solusi yang memuaskan. Ketidakpastian ini bisa menghambat proses pengambilan keputusan. 9) Ketidapahaman tentang Pentingnya Partisipasi: Beberapa stakeholder mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya partisipasi mereka dalam pengembangan kurikulum, sehingga kurang antusias untuk terlibat.

Dalam menghadapi hambatan dan tantangan ini, penting bagi madrasah dan para pengambil keputusan pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, mendengarkan dengan seksama, dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif. Dengan cara ini, hambatan dapat diatasi, dan partisipasi stakeholder dapat dijadikan landasan yang kuat dalam mengembangkan kurikulum yang berdaya guna dan sesuai dengan kebutuhan madrasah itu sendiri. (Sholeh et al., 2023)

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa kolaborasi stakeholder memiliki peran yang sangat penting dalam penjaminan mutu lembaga pendidikan Islam. Keterlibatan berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, pemerintah,

dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas, karena masing-masing pihak memiliki kontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi proses pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, keberhasilan kolaborasi stakeholder dipengaruhi oleh komunikasi yang efektif, kesamaan tujuan, serta kepemimpinan yang kuat dalam mengelola dan mengarahkan seluruh sumber daya pendidikan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan seperti perbedaan pandangan, keterbatasan waktu dan sumber daya, kurangnya komunikasi, serta resistensi terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk membangun sinergi, meningkatkan partisipasi, dan menciptakan lingkungan yang inklusif agar kolaborasi dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, kolaborasi stakeholder yang efektif menjadi fondasi utama dalam meningkatkan dan menjaga mutu lembaga

pendidikan Islam secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2018). Peran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah. *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 41. <https://doi.org/10.30659/jpai.1.1.41-56>
- Habib, M., Huda, Z., & Sugiyo, S. (2025). *Peran Stakeholder Suatu Instansi Pendidikan dalam Mencapai Keefektifan Pembelajaran*. 3.
- Istiana, P. (n.d.). 162764-ID-kolaborasi-perpustakaan-stakeholder. 241–250.
- Saima Sonang Pohan, Neliwati, M. R. (2024). MEMBANGUN KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM MANAJEMEN PEMBELAJARAN KURIKULUM. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09.
- Sholeh, M. I., Fathurro'uf, M., Sokip, S., Syafi'i, A., 'Azah, N., & Andayani, D. (2023). Partisipasi Stakeholder dalam

- Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Pesantren. *Edu Journal Innovation in Learning and Education*, 1(2), 121–141.
<https://doi.org/10.55352/edu.v1i2.759>
- Surawardi, S. (2017). Karakteristik dan Konsep Pendidikan Islam yang Terkandung dalam Surah Al-A'raf Ayat 179. *Transformatif*, 1(1), 32.
<https://doi.org/10.23971/tf.v1i1.660>
- Syahputra, A., Febriani, R. S., Syaifuddin, M., Negeri, I., & Syarif, S. (2023). Manajemen Penjaminan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan ...*, 7, 29046–29057.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/11652%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/11652/9000>
- Syibromilisi, Sofiati, D., & Wardatushobariah, N. (2023). Peran Stakeholder Dalam Manajemen Madrasah Unggul Berbasis TQM di MI Plus Istiqomah Syibromilisi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 5(1), 19–31.
- Turmuzi, M. (2021). KONSEP PENDIDIKAN DAN ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF DALAM MEMANUSIAKAN MANUSIA. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Verliya Veriyani*, B. N. P. Y. H. T. (2023). Kolaborasi Stakeholder Dalam Pengembangan Ruang Publik Stakeholders Collaboration In Public Space DevelopmentT. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 242–250.